

SUSTAINABLE ACCOUNTING ENVIRONMENTAL SEBUAH TINJAUAN FENOMENOLOGI

Siti Kustinah

Program Studi Akuntansi STEMBI – BANDUNG BUSINESS SCHOOL
sitikustinah72@gmail.com

Yuni Dwi Lestari

Program Studi Akuntansi STEMBI – BANDUNG BUSINESS SCHOOL
yunidwi.2706@gmail.com

Abstrak

Tujuan _ memaparkan fenomena-fenomena yang berkaitan akuntansi lingkungan berkelanjutan (Sustainable Accounting Environmental) serta melihat bagaimana perkembangan dalam pembuatan Sustainability Reporting di Indonesia

Metode _ Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai dokumen dengan melalui studi literatur

Temuan _ Sejak adanya UU Perseroan Terbatas pasal 74 no. 40 tahun 2007 mengatur tentang kewajiban pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga tidak ada lagi sebutan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility Disclosure) yang sukarela namun menjadi suatu hal yang wajib dilaksabakan, selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK no. 51 tanggal 27 Juli 2017 mengeluarkan peraturan pertama mengenai penerbitan Sustainability Reporting.

Adanya ajang penghargaan ISRA (Sustainability Reporting Awards) sejak tahun 2005 kesadaran perusahaan dari tahun ke tahun untuk ikut serta dalam membuat serta mengembangkan laporan keberlanjutan terus meningkat Pada tahun 2005 tercatat hanya ada 1 perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan, meskipun laporan keberlanjutan masih bersifat sukarela namun hingga akhir 2016 sebanyak 120 perusahaan telah menerbitkan laporan keberlanjutan di Indonesia.

Implikasi _ dalam rangka mengatasi isu isu akuntansi lingkungan untuk ikut berpartisipasi dalam melastarikan alam, entitas harus meningkatkan transparansi kegiatan usaha mereka.

Originalitas _ Penulis mengumpulkan berbagai fenomena terkait mengenai dari berbagai artikel, surat kabar dan jurnal baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik di berbagai situs web.

Tipe Penelitian _ Studi Literatur

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Laporan Berkelanjutan, ISRA

I. PENDAHULUAN

Isu-isu akuntansi berkelanjutan untuk ikut berpartisipasi dalam melestarikan alam sudah merupakan bahan mutlak untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam dunia bisnis. Untuk mendukung pelaporan ini akuntansi memiliki pelaporan penting, karena diperlukan kerja keras dan peranan mereka beserta kantor akuntannya untuk menyertakan penilaian unsur penyelamata lingkungan dalam pekerjaannya, demi keberlanjutan profesinya (Cahyanti,2017). Kebutuhan informasi tentang entitas tidak hanya laporan keuangan, informasi non keuangan mulai mendapat perhatian dan diperlukan untuk mengambil keputusan. Selain laporan keuangan, terdapat laporan yang dihasilkan oleh entitas seperti: laporan tahunan, sustainability report, prospektus, dan laporan lain untuk memenuhi otoritas regulator. Laporan tahunan yang diwajibkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bagi entitas yang terdaftar di Pasar Modal mengombinasikan informasi keuangan

dan non keuangan. Informasi tentang produk, sumber daya manusia, aktivitas sosial, penanggulangan lingkungan, dan tata kelola entitas dilaporkan melengkapi informasi kinerja keuangan entitas dalam laporan tahunan. Seiring dengan terjadinya perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) yang sedang melanda dunia, investor dan kalangan masyarakat memerlukan informasi tentang bagaimana kegiatan entitas dalam mengelola lingkungan untuk memastikan bahwa aktivitas entitas tidak merusak lingkungan. Entitas secara komprehensif mempertanggung jawabkan aktivitas entitas melalui “*triple bottom line*” yaitu “*responsibility to profit, planet and people*”. Pelaporan nonkeuangan dapat dilakukan dalam laporan tahunan atau entitas membuat sendiri laporan untuk kegiatan non keuangan terutama untuk pelaporan lingkungan. Pelaporan atas aktifitas entitas yang berhubungan dengan lingkungan hidup kita kenal dengan nama *sustainability report*. Selain melaporkannya dalam laporan keuangan, aktivitas sosial dan penanganan lingkungan juga dilaporkan dalam situs WEB entitas. Pelaporan atas kegiatan ini di Indonesia masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Namun beberapa negara di dunia, sudah mewajibkan entitas untuk melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas sosial dan lingkungan hidup (Martani et al,2017:10-11)

Sementara itu mantan Wakil Presiden Indonesia **Boediono** menghimbau perusahaan untuk menyalurkan dana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) untuk berbagai upaya penyelamatan lingkungan. Ia menyatakan bahwa CSR itu penting termasuk *green economy*. Melalui program CSR perusahaan harus bisa menyediakan teknologi baru dan mendukung upaya penggiat lingkungan hidup dan lain sebagainya. Hal tersebut penting sebagai bagian dari pembangunan keberlanjutan yang seimbang dengan mendukung upaya pencegahan pemanasan global (Slay,2012). Wakil ketua I Bidang Organisasi dan Kelembagaan Badan Pengurus Pusat (BPP) Forum CSR Kessos **Sarman Simanjorang** menegaskan masih sedikit perusahaan yang mempunyai sistem CSR. Ia membeberkan beberapa kriteria perusahaan yang memiliki sistem yang berbeda dalam penerapan *Corporate Social Responsibility* yaitu ada perusahaan yang sudah memiliki program CSR, perusahaan tersebut sudah mempunyai komitmen yang tinggi dan memiliki Manager khusus di CSR. Ada pula perusahaan yang memiliki kemauan namun terkadang mereka tidak mengerti cara untuk menyalurkannya dan yang terakhir ada perusahaan yang jika di minta mereka melakukannya dan sebaliknya jika tidak diminta mereka tidak melakukannya. (Wulandari,2016). Menurut **Troy Pantouw**, Corporate Comunication Director Aqua Grup menuturkan bahwa prinsip CSR seperti akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, penghormatan kepada kepentingan para pemangku kepentingan hingga penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) harus dapat dikomunikasikan dalam program CSR. Pemangku Kepentingan dan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kontribusi perusahaan bagi keberlanjutan (Primus,2015). Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat **Agung Laksono** mengatakan meskipun sebagian besar pengusaha lokal sudah memiliki program kemanusiaan melalui aksi kepedulian sosial perusahaan melalui CSR, namun tidak bersifat sistematis dan akuntabel (Gatra,2014).

Dalam tulisan ini penulisan ingin memaparkan fenomena-fenomena yang berkaitan akuntansi lingkungan berkelanjutan (*sustainable accounting environmental*), melihat bagaimana perkembangan dalam pembuatan laporan keberlanjutan di Indonesia serta menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena tersebut.

II. KAJIAN TEORI CSR dan Pengungkapannya

Menurut Dawin yang dikutip oleh **Rahmawati** (2012:180)

“Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial kedalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum”.



Gambar 1
Piramida Tipologi CSR

Sumber: data olahan

Dalam CSR: *Evolution of Definition Construct* (1999), Carroll menyusun piramida tiopologi CSR yang dapat menjadi kerangka menganalisis program CSR, yaitu:

1. *Economic Responsibility*, pada tingkat paling dasar ini tujuan CSR untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Program CSR berorientasi meningkatkan efisiensi dalam siklus produksi atau diolah sedemikian rupa untuk menjadi bahan pemasaran. Contohnya iklan yang memuat substansi CSR
2. *Legal Responsibility*, beberapa negara termasuk Indonesia menempatkan CSR sebagai bentuk kewajiban. Hal ini tercermin dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perusahaan ramai-ramai melaksanakan CSR demi menggugurkan kewajiban regulasi
3. *Ethical Responsibility*, program-program CSR pada tipe ini berorientasi mengurangi dampak negatif prodik perusahaan. Misalnya, perusahaan Migas dan otomotif berlomba menanam pohon guna menyerap CO₂, dampak dari bahan bakar.
4. *Philanthropic Responsibility*, pada tingkat paling tinggi ini perusahaan menempatkan diri sendiri sebagai agen yang turut aktif menyelesaikan masalah-masalah melalui program CSR.

Walaupun pada tingkatan yang berbeda-beda keempat tipologi diatas mempunyai satu prinsip dasar yang sama, yakni "menciptakan kebaikan". Untuk perusahaan melalui peningkatan profit dan pemenuhan kewajiban hukum, sedangkan bagi lingkungan dan sosial melalui program yang berprinsip pembangunan berkelanjutan (**Wiwoho,2015**). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting*, atau *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005). BAPEPAM belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan (*corporate social responsibility*), akibatnya yang terjadi di dalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkannya. CSR sangat tergantung dari komitmen dan norma etika perusahaan untuk turut memikirkan kondisi sosial sekitarnya. Wacana CSR tidak pernah menjadi prioritas utama bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang diperoleh ketika mereka memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk pengungkapannya, maka perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan informasi tersebut. (**Rahmawati,2012:183**)

Sustainable Accounting Environmental (Akuntansi Lingkungan Berkelanjutan)

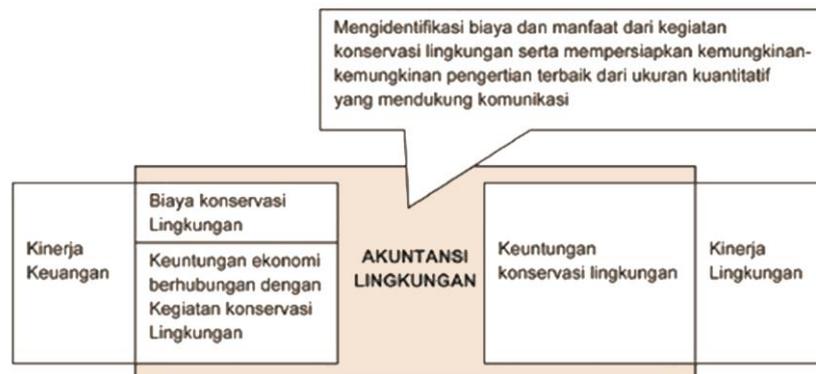
Akuntansi lingkungan merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menilai, menyajikan dan mengungkapkan komponen-komponen yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan (Mulyani,2013) Akuntansi lingkungan mengukur performa lingkungan yang terkait dengan peran sosial yang dilakukan oleh perusahaan termasuk pemahaman, pengukuran dan pengaturan biaya dan pendapatan lingkungan (Van,2011). Akuntansi Lingkungan (*Environmental Accounting* atau EA) merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (*environmental costs*) ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun non-keuangan yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau *United States Environment Protection Agency* (US EPA) akuntansi lingkungan adalah fungsi penting akuntansi lingkungan adalah untuk menyajikan biaya-biaya lingkungan bagi para *stakeholders* perusahaan, yang mampu mendorong pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-biaya ketika pada waktu yang bersamaan, perusahaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*environmental costs*) dan manfaat atau efek (*economic benefit*). Akuntansi lingkungan diterapkan oleh berbagai perusahaan untuk menghasilkan penilaian kuantitatif tentang biaya dan dampak perlindungan lingkungan (*environmental protection*). Pada dasarnya penjelasan mengenai konsep akuntansi lingkungan harus mengikuti beberapa faktor berikut, antara lain: (**Sukma Devani,2013**)

1. Biaya konservasi lingkungan (diukur dengan menggunakan nilai satuan uang).
2. Keuntungan konservasi lingkungan (diukur dengan unit fisik).
3. Keuntungan ekonomi dari kegiatan konservasi lingkungan (diukur dengan nilai satuan uang/rupee).

Bentuk pelaporan isi di Indonesia terpengaruh oleh ketentuan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh berbagai global profesional. Secara khusus di Indonesia ditentukan oleh Dewan Khusus Akuntansi Keuangan.

Ada beberapa unsur yang di susun dalam laporan keuangan, yang digunakan untuk mengukur suatu entitas posisi keuangan dan kinerja keuangan. Termasuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan pengeluaran. Definisi dari unsur-unsur laporan keuangan konvensional tidak mampu mencerminkan semua konsekuensi dari semua entitas. Secara khusus, barang yang yang memenuhi definisi unsur-unsur yang dijelaskan hanya dapat diakui bila: (Cahyanti,2017)

- Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan dapat berhubungan dengan item yang akan mengalir dari atau ke suatu entitas
- Item yang memiliki biaya atau yang dapat diukur secara handal. Jadi, misalnya kewajiban di definisikan sebagai kewajiban sekarang yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang merupakan penyelesaian yang diharapkan



Gambar 2

Gambar Keterkaitan Masing-masing Faktor.

Sumber: Ministry of the Environment Japan, 2005: *Environmental Accounting Guidelines*.

Dikutip dari artikel **Sukma Devani,2013**

Adapun transaksi yang dapat dikelompokkan ke dalam akuntansi lingkungan meliputi pembiayaan yang dilakukan perusahaan dan pemerintah dalam melakukan konservasi lingkungan ke dalam pos lingkungan dan praktik bisnis perusahaan, elemen keuangan sehubungan dengan kegiatan konservasi lingkungan yang dilakukan perusahaan (Suartana,2010) dan kewajiban utang/provisi perusahaan yang timbul atas masalah lingkungan (Pratiwi,2016). Transaksi lingkungan dan keuangan tersebut diproses dengan metode yang ada dalam ilmu akuntansi dan dilaporkan secara terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban sosial lingkungan (CSR) atau dalam laporan lingkungan tersendiri. Laporan tersebut berguna dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan lingkungan (Rahmawati,2012:183)

Triple Bottom Line

Triple Bottom Line (TBL) mengimplikasikan bahwa perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan *stakeholder* (semua pihak yang terlibat dan terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan perusahaan) daripada kepentingan *shareholder* (pemegang saham) kepentingan *stakeholder* ini dapat dirangkul menjadi tiga bagian yaitu kepentingan dari sisi keberlangsungan laba (*profit*), sisi keberlangsungan masyarakat (*people*) dan sisi keberlangsungan lingkungan hidup (*planet*).

Profit disini lebih dari sekedar keuntungan. *Profit* disini berarti menciptakan *fire trade* dan *etical trade* dalam berbisnis. *People* menekankan kepentingan praktek bisnis suatu perusahaan yang mendukung kepentingan tenaga kerja. *Planet* berarti mengelola dengan baik penggunaan energi terutama atas pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (Felisia, 2014)

The Stakeholder Theory

The Stakeholder Theory menyatakan bahwa keberadaan perusahaan harus menguntungkan semua pemangku kepentingan yang tertarik dan tidak hanya memegang saham langsung. Diantara yang lain, para pemangku kepentingan termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, masyarakat umum dan pemerintah. Freeman (2010.p 31) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai "kelompok-kelompok yang tanpa dukungannya organisasi tidak akan ada lagi". Menurut teori tersebut semua pemangku kepentingan berhak untuk mengakses informasi

tentang informasi akuntansi lingkungan dan sosial yang diungkapkan di perusahaan terlepas dari kekuatan kelompok pemangku kepentingan manapun (Ali & Rizwan,2013). Menurut teori:

“Keberadaan korporasi yang berkelanjutan membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan dan persetujuan mereka harus dicari dan kegiatan perusahaan di sesuaikan untuk mendapatkan persetujuan itu. Semakin kuat para pemangku kepentingan , semakin banyak perusahaan harus beradaptasi”

(Al Amosh & Noorhayati, 2018)

Legitimacy Theory

Menurut *Legitimacy Theory* perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice* dan perusahaan berusaha menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk mendapatkan legitimasi dari kelompok tersebut. oleh karena itu perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut menjalankan setiap aktivitasnya. Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dilakukan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. (Fauzi.et all,2016)

Agency Theory

Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Perusahaan dipandang sebagai sekumpulan kontrak antara manager perusahaan dan pemegang saham. Prinsipal atau pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan terhadap pihak manajemen.

Manajer sebagai pihak yang diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan berkewajiban menyediakan laporan keuangan akan cenderung untuk melaporkan sesuatu yang memaksimalkan utilitasnya dan mengorbankan kepentingan pemegang saham. Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut dengan masalah keagenan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga dapat mengurangi biaya keagenan (*agency cost*) (Fauzi.et all,2016).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Obyek analisis penelitian ini adalah akuntansi lingkungan berkelanjutan atau *sustainable accounting environmental*. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai dokumen dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Adapun langkah-langkah analisis yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Mengumpulkan fenomena-fenomena terkait *sustainable accounting environmental*
Data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh dari berbagai artikel, surat kabar dan jurnal baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik di berbagai situs web
2. Menganalisis fenomena -fenomena terkait *sustainable accounting environmental*
Penulis mencoba memahami fenomena terkait yang berhubungan dengan akuntansi lingkungan dan laporan keberlanjutan yang terkait dengan *sustainable accounting environmental*
3. Menarik kesimpulan
Penarikan kesimpulan didasarkan pada analisis data yang dilakukan sehingga dapat menggambarkan objek penelitian secara tepat.

IV. PEMBAHASAN

Perkembangan Sustainable Reporting di Indonesia

Sejak tanggal 23 september 2007, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility disclosure*) mulai diwajibkan melalui UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang hudup dari ekstrasi sumber daya alam. Dalam Pasal 74 Undang-Undang tersebut diatur tentang kewajiban pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sehingga, tidak ada lagi sebutan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility disclosure*) yang sukarela, namun pengungkapan yang wajib hukumnya. Sementara itu, perkembangan CSR di luar negeri sudah sangat populer. Bahkan dari beberapa negara, CSR digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah perusahaan dengan dicantumkannya informasi CSR di dalam catatan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan (Rahmawati,2012:184).

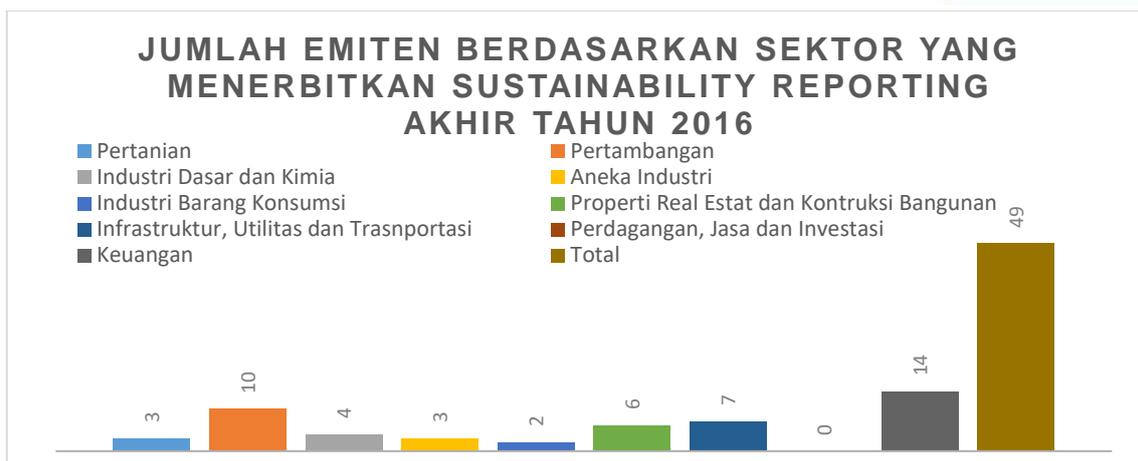
Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, kewajiban sosial pemberian CSR hanya terbatas pada perseroan atau perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Wakil Ketua Komisi VIII DPR **Abdul Malik Haramain** mengatakan pihaknya ingin semua perusahaan swasta maupun BUMN wajib untuk melakukan program CSR. Menurutnya RUU Tanggung Jawab Sosial diinisiasi dengan beberapa tujuan. Pertama, memperkuat kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial mereka ke masyarakat. Malik menilai pelaksanaan program CSR yang ada masih lemah. Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan program CSR juga masih rendah dan tidak transparan. Dan tujuan kedua, untuk membantu menyingkronkan program pengentasan dan kemiskinan pemerintah. Malik mengatakan, melalui RUU ini pelaksanaan program CSR yang selama ini tidak terkoordinasikan dengan baik akan ditata (**Triyono,2016**).

Diterapkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang sebelumnya merupakan suatu hal yang bersifat sukarela akan berubah menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan. Para pengusaha berargumen bahwa CSR tidak boleh dipaksakan karena bersifat sukarela dan menjadi bagian dari strategi perusahaan. Mewajibkan perseroan menyisihkan dana CSR melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan merugikan kepentingan pemegang saham karena akan meningkatkan biaya (*cost*) dan menurunkan laba perseroan (**Rahmawati,2012:179**).

Haryadi Sukamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Aprindo) menyatakan menolak kewajiban melakukan CSR untuk setiap perusahaan, CSR harus bersifat sukarela oleh sebuah korporasi untuk masyarakat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Penetapan UU yang mengatur CSR merupakan kesalahan besar, karena di negara-negara lain CSR tidak diwajibkan pada perusahaan swasta. Haryadi menganggap orang yang memasukkan UU CSR tersebut tidak paham, dan menyebutkan bahwa CSR merupakan beban pajak baru. (**Pratama,2016**). **Heni Susanto**, *Head of Stake Holdre Relation, Regional Relation* dan CSR HM Sampoerna mengatakan kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan (CSR) lebih baik dilakukan secara sukarela, tidak wajib, karena tiap aktivitas CSR harus disesuaikan dengan bisnis perusahaannya (**Triyono,2016**).

Menurut Ketua Humas IAI Malang **Ana Sopanah**, perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga harus berorientasi pada konsep *triple bottom line*, yaitu: *profit, people, dan planet*. Dengan begitulah konsep keberlanjutan perusahaan harus diperhatikan, bahkan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat, serta turut menjaga kelestarian lingkungan. Orientasi tersebut sejalan dengan mandat Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan berhak menggunakan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia disekitarnya, tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan semua akibat yang diperoleh dari proses operasionalnya. Akuntansi lingkungan (*green accounting*) menjadi isu penting dalam dunia pendidikan saat ini khususnya di bidang akuntansi. Akuntansi lingkungan sendiri mulai diperaktekan sejak 1980-an di Eropa, sementara Jepang baru mempraktekannya sejak 2006. Praktek di Eropa dan Jepang mengenai biaya lingkungan justru meningkatkan laba perusahaan, karena investor tertarik untuk berinvestasi. Kedepan, eksistensi perusahaan tidak hanya untuk memaksimalkan nilai *shareholders*, namun lebih dari itu, menjaga kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*), yaitu pihak-pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan, seperti karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, LSM, media massa dan pemerintah. Sehingga dalam hal ini perusahaan memaknai CSR bukan lagi sebagai *expense* tetapi investasi perusahaan terkait *sustainability*-nya. Kajar Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang **Nurika Restuningdyah** menyatakan dalam perspektif bisnis global. Perusahaan perlu Sertifikasi atau ISO pengelolaan lingkungan untuk bersaing di pasar global (**Latief,2016**).

Sustainability Reporting atau laporan keberlanjutan merupakan bentuk laporan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka untuk mengungkapkan (*disclose*) atau menkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja lingkungan, sosial dan tatakelola yang baik (LST) secara akuntabel. Pengungkapan *Sustainability reporting* di Indonesia saat ini masih sebatas bersifat sukarela (*voluntary*). Walaupun masih bersifat sukarela, sudah terdapat hampir 9% perusahaan yang telah *listing* di bursa efek Jakarta (BEI) telah menerbitkan laporan berkelanjutan. Penerbitan laporan berkelanjutan yang ada di Indonesia saat ini, hampir sebagian besar berdasarkan standar pengungkapan yang ada dalam Global Reporting Index (GRI). Sampai dengan akhir tahun 2016, dapat dilihat bahwa sebanyak 49 perusahaan *listing* BEI telah menerbitkan laporan berkelanjutan. Antusiasme yang cukup tinggi dari penerbit laporan keberlanjutan tersebut menunjukkan bahwa laporan tersebut merupakan laporan yang penting untuk diterbitkan terutama dalam hal untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tatakelola yang baik. (www.ojk.go.id,2017)



Gambar 2
Jumlah Emiten Berdasarkan Sektor yang Menerbitkan Sustainability Reporting Akhir Tahun 2016

Sumber: www.ojk.go.id

Dari top 100 perusahaan yang terdaftar di bursa Efek Jakarta (BEI), baru 30% perusahaan yang membuat *Sustainability Report* (SR) (Ernst & Young 2016). Sedangkan dari tahun 2000 sampai Oktober 2017, baru ada 94 perusahaan yang melakukan reporting melalui *Global Reporting Initiative* (GRI). Dengan membuat laporan keberlanjutan, perusahaan akan lebih mudah mendapatkan investor, reputasinya juga akan lebih baik untuk perusahaan, sehingga investor akan lebih tertarik kepada mereka. *Country Program Manager* GRI di Indonesia, **Bob Eko Kurniawan** menjelaskan bahwa ada desakan dari investor khususnya investor uang berasal dari luar agar perusahaan yang sudah terbuka (*listed company*) untuk membuat laporan keberlanjutan. Investor dari luar sudah mulai terdidik dalam hal keberlanjutan, mereka akan mengutamakan program keberlanjutannya, barulah mereka mau menanamkan uangnya. Menurutnya peringkat Indonesia lebih besar dibandingkan South East Asia, Amerika Latin dan Afrika, karena populasi Indonesia cukup banyak dan tingkat korporasinya lebih maju. Namun, dibandingkan dengan Eropa dan Amerika, Indonesia masih tertinggal. Pemerintah sendiri sejak 1999 sudah banyak membuat regulasi mengenai CSR. Awalnya hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja yang diwajibkan dengan nama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), namun kemudian berlanjut ke *private company*. Sedangkan untuk *Sustainability Report* (SR), pemerintah memang belum membuat regulasinya, sampai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK no.51 tanggal 27 juli 2017 mengeluarkan peraturan pertama mengenai SR. Bukan hanya untuk kepentingan pelaporan saja namun kepentingan agar dalam menjalankan perusahaan bisa sustain (Anonim.2017).

Menurut mantan Menteri Lingkungan Hidup (1993-1998) Sarwono Kusumaatmadja, laporan keberlanjutan oleh perusahaan sebagai kewajiban tanah air adalah hal penting. Palsunya, laporan keberlanjutan bermanfaat untuk menghindarkan investasi dari resiko lingkungan dan resiko sosial (Primus,2015). Ia juga mengatakan bahwa animo perusahaan untuk membuat laporan keberlanjutan atau laporan CSR semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (Kusumaputra,2012) semakin banyak perusahaan yang sadar bahwa laporan keberlanjutan sangat penting dalam membangun dan mengembangkan bisnis bersama pemangku kepentingan (Sutriyanto,2016)

Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA)

Ajang penghargaan *Indonesia Sustainability Reporting Awards* diadakan dalam rangka memberikan pengakuan bagi perusahaan-perusahaan yang telah mempublikasikan laporan keberlanjutan dan/atau laporan kegiatan CSR serta menggunakan situs internet korporat sebagai sarana untuk mendiseminasi segala kegiatan mereka. Ajang penghargaan ini dituanrumahi oleh lembaga *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR), yang merupakan lembaga independen nir laba yang didirikan pada 23 Juni 2005 oleh lima organisasi yaitu: Akuntan Manajemen Indonesia, Indonesia-Netherlands Association, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Forum for Corporate Governance in Indonesia dan Asosiasi Emiten Indonesia. NCSR disirikan untuk mendukung, membangun, mengevaluasi dan melaporkan kemajuan pihak swasta dalam penerapan program CSR (*corporate social responsibility*) atau keberlanjutan perusahaan (*corporate sustainability/CS*) sebagai landasan dari pembangunan keberlanjutan. *Indonesia Sustainability Reporting Awards* (ISRA) atau penghargaan laporan keberlanjutan bagi perusahaan Indonesia diadakan sejak 2005

memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah mengembangkan laporan keberlanjutan atau yang biasa disebut laporan *corporate social responsibility* (CSR) ditandai dengan pembuatan laporan (SR) perusahaan sesuai dengan standar yang telah disepakati yaitu GRI atau G4. Laporan keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) adalah laporan yang memuat kinerja perusahaan dalam tiga aspek yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Laporan ini menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menilai sejauh mana perusahaan mengatasi isu keberlanjutan seperti penghematan dan konservasi energi, pengelolaan air, pengelolaan limbah, mengatasi pencemaran udara, serta isu-isu sosial seperti partisipasi perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.



Gambar 3
Perkembangan Laporan Keberlanjutan di Indonesia

Sumber: data olahan

Pada tahun 2005 tercatat hanya ada 1 perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan maka pada tahun 2012 sudah ada 40 perusahaan di Indonesia yang membuat laporan keberlanjutan sebagai sarana komunikasi kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada publik dan 29 perusahaan diantaranya mengikuti ajang penghargaan *Indonesia Sustainability Reporting Awards* (ISRA). Hingga tahun 2012 perusahaan-perusahaan yang telah mengembangkan laporan keberlanjutan terdiri dari 70% perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 30% adalah perusahaan swasta (Kusumaputra, 2012). Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 50 perusahaan telah membuat laporan keberlanjutan atau CSR, namun jumlah ini masih jauh di bawah jumlah perusahaan terbuka yang tercatat pada bursa efek apalagi jika dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan yang ada di Indonesia (Mustolih, 2017). Untuk tahun 2013 ajang lomba ISRA diikuti oleh 34 perusahaan (Hidayat, 2013). Laporan yang diluncurkan bersamaan dengan ajang *Sustainability Reprting Award* (SRA) menunjukkan bahwa di Indonesia kian banyak perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan ketimbang pada tahun 2005 silam. Total pada tahun 2014 ada 60 perusahaan yang sudah membuat laporan keberlanjutan. Catatan menunjukkan pada tahun 2014 ada sebanyak 35 perusahaan yang mengikuti ajang ini (Primus, 2014). Pada tahun 2015 ajang ini diikuti oleh 37 perusahaan termasuk 4 perusahaan luar negeri dan 1 LSM dari Papua (Primus, 2015). ISRA ke-12 tahun 2106 diikuti oleh 55 perusahaan, 14 diantaranya merupakan UKM dan 2 peserta dari Banglades. Meskipun laporan keberlanjutan masih bersifat sukarela namun hingga akhir 2016 sebanyak 120 perusahaan telah menerbitkan laporan keberlanjutan di Indonesia (Sutriyanto, 2016). SRA tahun 2017 diikuti oleh 40 entitas yang terdiri dari 38 perusahaan dan 2 lembaga pemerintahan (primus, 2018).

V. PENUTUP

Kesimpulan

- Sejak adanya UU Perseroan Terbatas pasal 74 no. 40 tahun 2007 mengatur tentang kewajiban pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga tidak ada lagi sebutan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR disclosure) yang sukarela namun menjadi suatu hal yang wajib dilaksabakan, selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK no. 51 tanggal 27 Juli 2017 mengeluarkan peraturan pertama mengenai penerbitan *Sustainability Reporting*.
- Adanya ajang penghargaan *Sustainability Reporting Awards* (ISRA) atau penghargaan laporan keberlanjutan bagi perusahaan Indonesia yang dituan rumahi oleh lembaga *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR), sejak tahun 2005 memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah

mengembangkan laporan keberlanjutan atau yang biasa disebut laporan *corporate social responsibility* (CSR) ditandai dengan pembuatan laporan keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) perusahaan sesuai dengan standar yang telah disepakati yaitu GRI atau G4. Dimana laporan tersebut memuat kinerja perusahaan dalam tiga aspek yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial, sesuai dengan konsep *Triple Bottom Line* yaitu "*responsibility to profit, planet and people*".

- Dengan diadakannya ajang penghargaan ISRA kesadaran perusahaan dari tahun ke tahun untuk ikut serta dalam membuat serta mengembangkan laporan keberlanjutan terus meningkat sebagai sarana strategi bisnis dan sebagai sarana bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menilai sejauh mana perusahaan mengatasi isu keberlanjutan seperti penghematan dan konservasi energi, pengelolaan air, pengelolaan limbah, mengatasi pencemaran udara, serta isu-isu sosial seperti partisipasi perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
- Terdapat hampir 9% perusahaan yang telah *listing* di bursa efek Jakarta (BEI) telah menerbitkan laporan berkelanjutan. Penerbitan laporan berkelanjutan yang ada di Indonesia saat ini, hampir sebagian besar berdasarkan standar pengungkapan yang ada dalam Global Reporting Index (GRI).
- Pada tahun 2005 tercatat hanya ada 1 perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan, meskipun laporan keberlanjutan masih bersifat sukarela namun hingga akhir 2016 sebanyak 120 perusahaan telah menerbitkan laporan keberlanjutan di Indonesia.

Saran

- Bagi penelitian selanjutnya
Bagi para peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak fenomena terkait akuntansi lingkungan berkelanjutan, terkait standar apa saja yang digunakan entitas untuk menyusun laporan keberlanjutan yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia serta ajang penghargaan lain selain *Indonesia Sustainability Reporting Awards* (ISRA)
- Bagi Pengguna
Bagi perusahaan dan organisasi lain di Indonesia, khususnya dalam rangka mengatasi isu-isu akuntansi lingkungan untuk ikut berpartisipasi dalam melastarkan alam, entitas harus meningkatkan transparansi kegiatan usaha mereka karena kelangsungan hidup perusahaan tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan dimana entitas tersebut menjalankan setiap aktivitasnya. Dengan membuat laporan keberlanjutan, entitas akan lebih mudah mendapatkan investor, reputasinya juga akan lebih baik, sehingga investor akan lebih tertarik kepada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amosh, Hamzeh A.M & Noorhayati. M.2018.Sustainability and Corporate Reporting: A Review on Environmental and Social Accounting Disclosure. International Journal of Accounting, Finance and Business Vol:3 Issues:8 (March,2018) pp.78-87
Melalui: <https://www.researchgate.net/publication/324599951>
- Anonim.2017. "Sustainability report (SR) di Indonesia Sepi Peminat". MajalahCSR.id, 30 October 2017
Melalui: <https://majalahcsr.id/Sustainability-report-sr-di-indonesia-sepi-peminat/> diakses pada Desember 2018
- Cahyanti, Lisa Suci.2017.Sustainability Accounting (Akuntansi Keberlanjutan).E-jurnal Arthavidya Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 19, No 2 (2017).
Melalui: <http://arthavidya.wisnuwardhana.ac.id/index.php> diakses pada November 2018
- Fauzi, Armi Sulthon. Ni Ketut Suransi. Alamsyah.2016. Pengaruh GCG dan CSR terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Infestasi Vol.12, No.1, Juni 2016
Melalui: <http://journal.trunjaya.ac.id/infestasi/articel/download/1797/1485&ved> diakses pada Desember 2018
- Felisia, Amelia Limijaya.2014.Triple Bottom Line dan Sustainability. E-jurnal Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Unpar Vol 18, No. 1, Januari 2014.
Melalui: <http://media.neliti.com/media/publications/27607-ID-triple-bottom-line-dan-sustainability.pdf&ved> diakses pada Desember 2018
- Gatra, Sandro.2014. "Indonesia Bererima Kasih kepada Bill Gates". Kompas.com, Minggu 6 April 2014
Melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2014/04/06/1629282/Indonesia.Berterima.Kasih.Kepada.Bill.Gates> diakses pada Desember 2018
- Hidayat,Feriawan.2013."Sejumlah Perusahaan Raih ISRA 2013". Beritasatu.com, Jum'at 20 Desember 2013
Melalui: <https://www.beritasatu.com/lingkungan/156704-sejumlah-perusahaan-raih-isra-2013.html> diakses pada Desember 2018

- Kusumaputra,R. Adhi.Robert Adhi Ksp.2012.“Antam Raih Penghargaan Best Website 2012”. Kompas.com, Senin 3 Desember 2012
Melalui :
<https://ekonomi.kompas.com/read/2012/12/03/21350969/Antam.Raih.Penghargaan.Best.Website.2012> diakses pada Desember 2018
- Latief.2016.“Biaya Lingkungan Dongkrak Laba Perusahaan?”. Kompas.com, Senin 09 Mei 2106, Melalui:
<https://edukasi.kompas.com/read/2016/05/09/07170081/Biaya.Lingkungan.Dongkrak.Laba.Perusahaan>. diakses pada Desember 2018
- Martani,Dwi.Sylvia Veronica Siregar.*et all*.2017.Akuntansi Keuangan menengan Berbasis PSAK,edisi 2 - Buku1.Jakarta:Salemba Empat
- Mustolih,Arif.2017.“Indonesia Sustainability Report Award”. MajalahCSR.id, 30 January 2017
Melalui: <https://majalahcsr.id/indonesia-sustainability-report-award/> diakses pada Desember 2018
- OJK.2017. “Infografis Lembaga Jasa Keuangandan Emiten Penerbit Sustainability Report”. www.ojk.go.id, 14 Maret 2017, Melalui: <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/riset-dan-statistik/Pages/SustainabilityReport-bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan-dan-Emiten.aspx> diakses pada Desember 2018
- Pratama,Adiatmaputra Fajar.Choirul Arifin.2016.“Apindo Akan Melawan Jika Ada UU yang Mewajibkan Perusahaan Jalankan Kegiatan CSR”. Tribunnews.com, Selasa 29 November 2016
Melalui: <https://www.google.com/amp/m.tribunnews.com/amp/bisnis/2016/11/29/apindo-akan-melawan-jika-ada-uu-yang-wajibkan-perusahaan-jalankan-kegiatan-csr> diakses pada Desember 2018
- Primus,Josephus.2014.“ Tujuh Pertanyaan untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan”. Kompas.com, Kamis 11 Desember 2014,
Melalui:
<https://sains.kompas.com/read/2014/12/11/13563571/Tujuh.Pertanyaan.untuk.Pengelolaan.Sumber.Daya.Alam.Berkelanjutan> diakses pada Desember 2018
- Primus,Josephus.2015.“Lingkungan Hidup Masih Jadi CSR Andalan”. Kompas.com, Selasa 20 Januari 2015
Melalui: <https://sains.kompas.com/read/2015/01/20/18004301/Lingkungan.Hidup.Masih.Jadi.CSR.Andalan> diakses pada Desember 2018
- Primus,Josephus.2015.“Penting, Laporan Keberlanjutan Perusahaan sebagai Kewajiban”. Kompas.com, Jum'at 18 Desember 2015
Melalui:
<https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/18/155455926/Penting.Laporan.Keberlanjutan.Perusahaan.sebagai.Kewajiban> diakses pada Desember 2018
- Primus,Josephus.2018.“Ini Cara Pupuk Kaltim Tingkatkan Nilai Perusahaan”. Kompas.com Kamis 1 Maret 2018
Melalui: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/01/191334326/ini-cara-pupuk-kaltim-tingkatkan-nilai-perusahaan> diakses pada Desember 2018
- Rahmawati.2012.Teorii Akuntansi Keuangan.Jakarta:Graha Ilmu
- Slay,Widiyabuana.2012.“Boediono Minta Perusahaan Ikut Selamatkan Lingkungan”. Tribunnews.com, Kamis 14 Juni 2012
Melalui: [http://m.tribunnews.com/nasional/2012/06/14/boediono-minta-perusahaan-ikut-selamatkan-lingku ngan](http://m.tribunnews.com/nasional/2012/06/14/boediono-minta-perusahaan-ikut-selamatkan-lingku-ngan) diakses pada Desember 2018
- Sukma,Devani.2013.Apa Sebenarnya Akuntansi Lingkungan itu?.
Melalui: <http://keuanganlsm.com/apa-sebenarnya-akuntansi-lingkungan-itu/> diakses pada November 2018
- Sutriyanto,Eko.2016. “PT Perusahaan Gas Negara Juara Umum Ajang Sustainability Report Award 2016”. Tribunnews.com, Minggu 18 Desember 2016
Melalui: <https://www.google.com/amp/m.tribunnews.com/amp/bisnis/2016/12/18/pt-perusahaan-gas-negara-juara-umum-ajang-sustainability-report-award-2016> diakses pada Desember 2018
- Triyono,Agus.Dicky Setiawan.2016. “CSR akan Diwajibkan ke Semua Perusahaan”. Kontan.co.id, Senin 25 April 2016
Melalui: <https://m.kontan.co.id/news/csr-akan-diwajibkan-ke-semua-perusahaan> diakses pada Desember 2018
- Wiwoho,Laksono Hari.2015. “Freeport, CSR, dan Kebatilan”. Kompas.com Senin 07 Desember 2015
Melalui:
<https://nasional.kompas.com/read/2015/12/07/15000061/Freeport.CSR.dan.Kebatilan?page=all> diakses pada Desember 2018
- Wulandari,Fitri.Hasiolan Eko P Gultom.2016.“Banyak Perusahaan Indonesia yang belum peduli CSR”. Tribunnews.com, Rabu 15 Juni 2016
Melalui: [https://www.google.com/amp/m.tribunnews.com/amp/bisnis/2016/06/15/banyak-perusahaan-indon esia-yang-belum-peduli-csr](https://www.google.com/amp/m.tribunnews.com/amp/bisnis/2016/06/15/banyak-perusahaan-indon-esia-yang-belum-peduli-csr) diakses pada Desember 2018